

**RELASI KUASA ANTARA PERHUTANI DAN MASYARAKAT DALAM  
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI BANYUMAS: KEPENTINGAN BISNIS  
VS COMMUNITY EMPOWERMENT**

<b>Title</b>	RELASI KUASA ANTARA PERHUTANI DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI BANYUMAS: KEPENTINGAN BISNIS VS COMMUNITY EMPOWERMENT
<b>Author Order</b>	2 of 2
<b>Accreditation</b>	
<b>Abstract</b>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam merespons orientasi Perhutani yang memprioritaskan pengembangan usaha (profits/bisnis) daripada pemberdayaan masyarakat desa hutan. Pendekatan studi menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMDH tidak dilibatkan secara signifikan dalam perencanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Lebih dari 12 tahun, Perhutani masih menjadi aktor dominan dengan kekuasaan besar menentukan pemangku kepentingan mana yang dikehendaki untuk terlibat dalam perencanaan programnya. Akibatnya, LMDH (masyarakat) merasa Perhutani tidak lagi menganggap serius peran LMDH dalam proses pengelolaan program-program PHBM. Dengan kata lain, peran LMDH hanya ada diatas kertas tetapi realitasnya tidak banyak berperan. Perhutani lebih fokus mengejar target keuntungan untuk kepentingan perusahaan tetapi di pihak lain tidak meningkatkan pembagian peran dengan LMDH sebagai mitra sejajar dalam program PHBM.</p> <p>This paper explores the power relations between state and society, specifically, after 12 years of implementing the policy of community-based forest management (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, known as PHBM). It investigates how villagers and its local institutions (Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH), and street-level bureaucracy (SLB) responses toward the current development of State Forest Cooperation (Perum Perhutani, SFC) orientation in generating profit rather than the people and the planet/environment. The result shows that the villagers through LMDHs are, in fact, never closely engage in planning PHBM activities. Over 12 years, the SFC is still become the dominant actor who have dominant power in determining which stakeholders that they wanted to be involved in planning PHBM activities. Consequently, LMDH feels that SFC is reluctant in taking seriously the roles of LMDH in planning the PHBM activities. SFC is pursuing their target in generating benefits merely for their own benefits without taking LMDH in as their equal partner in PHBM activities.</p>
<b>Publisher Name</b>	Universitas Negeri Semarang
<b>Publish Date</b>	2014-06-12
<b>Publish Year</b>	2014
<b>Doi</b>	DOI: 10.15294/komunitas.v6i1.2939
<b>Citation</b>	1
<b>Source</b>	KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture
<b>Source Issue</b>	Vol 6, No 1 (2014): Lokalitas, Relasi Kuasa dan Transformasi Sosial
<b>Source Page</b>	47 - 56
<b>Url</b>	<a href="https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2939/pdf">https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2939/pdf</a>
<b>Author</b>	KHAIRU ROOJIQIEN SOBANDI, S.IP, M.Si, M.A